

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS DI DESA PALEMRAYA
KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN
OGAN ILIR)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Oleh:

**ADINDA MARGARETA
07011281823182**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA (STUDI KASUS DI DESA PALEMRAYA KECAMATAN
INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

Oleh:

Adinda Margareta

07011281823182

| Pembimbing I | Tanda Tangan | Tanggal |
|---------------------|---------------------|----------------|
|---------------------|---------------------|----------------|

Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002



28/04/2025

| Pembimbing II | Tanda Tangan | Tanggal |
|----------------------|---------------------|----------------|
|----------------------|---------------------|----------------|

Dra. Tuty Khairunnisyah, MA
NIP. 196201051988032004



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA

NIP. 19691110 199401 1 001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA (STUDI KASUS DI DESA PALEMRAYA KECAMATAN
INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR)

SKRIPSI

Oleh:

ADINDA MARGARETA

07011281823182

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 23 Mei 2025
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Pembimbing:

1. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002
2. Dra. Tuty Khairunnisyah, MA
NIP. 196201051988032004

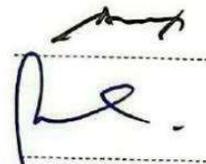
Tanda Tangan



Penguji:

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001
2. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009

Tanda Tangan



Mengetahui,


Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004


Ketua Jurusan
Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Margareta

NIM : 07011281823182

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Palembang Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya, 06 Mei 2025



Adinda Margareta

NIM 07011281823182

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

“Orang lain gak akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang ya.”

(Penulis)

Dengan rahmat dan ridho Allah SWT,

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, Ayah Marwan dan Ibu Maipantia
2. Kakak saya, Ayu Septiana
3. Adik saya, Dimas Hadinata
4. Seluruh Dosen FISIP UNSRI
5. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik 2018 FISIP UNSRI
6. Almamater saya.

ABSTRAK

Partisipasi ditujukan untuk melibatkan masyarakat dengan aspirasinya dalam kegiatan mengenai kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan yang bersifat partisipatif harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Idealnya masyarakat mengetahui dan mengerti kebutuhannya serta memberikan aspirasinya dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik. Pemerintah telah memberikan dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Dana tersebut dimaksudkan agar desa dapat mengelola pemerintahannya sendiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pada tingkatan apa partisipasi perempuan dalam pengelolaan dana desa di Desa Palembang melalui tangga partisipasi Arnstein. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori tangga partisipasi Sherry R. Arnstein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan berada pada tingkat kelima dan ketujuh yaitu penentraman dan pengendalian kewenangan. Pada tahap penganggaran berada pada tingkat ketujuh yaitu pendelegasian kewenangan. Pada tahap pelaksanaan berada pada tingkat ketujuh yakni pelimpahan kewenangan. Sedangkan pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban juga berada di tingkat pendelegasian kewenangan. Akan tetapi, partisipasi perempuan kelompok PKK dan posyandu tidak terdapat adanya partisipasi.

Kata kunci: Dana Desa, Partisipasi, Perempuan.

Pembimbing I



Dr. Alamsyah. S.IP., M.Si

NIP.197808182009121002

Pembimbing II



Dra. Tuty Khairunnisyah. M.A

NIP.196201051988032004

Indralaya, 26 Mei 2025

**Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. M. Nur Budiyanto. S. Sos., MPA.

NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

Participation is intended to involve the community with their aspirations in activities that concern the interests of the community. The implementation of participatory activities must start from the community itself. Ideally, the community knows and understands their needs and conveys their aspirations in order to achieve better village development. The government has provided funds to villages across Indonesia. These funds are intended so that villages can manage their own government and can improve the welfare of village communities. This research is a descriptive qualitative research with data collection methods of interviews, observation, and documentation. The purpose of this study was to determine the extent of women's participation in the management of village funds in Palembang Village through the Arnstein participation ladder. In this study the authors used Sherry R. Arnstein's participation ladder theory. The research results indicate that the level of women's participation in village fund management at the planning stage is at the fifth and seventh levels, namely the stabilization and control of authority. At the budgeting stage, it is at the seventh level, which is delegation of authority. At the implementation stage, it is at the seventh level, namely the transfer of authority. Meanwhile, at the bookkeeping, reporting, and accountability stages, it is also at the delegation of authority level. However, there is no participation from women in the PKK and posyandu groups.

Keyword: village funds, Participation, woman.

Advisor I



Dr. Alamsyah. S.IP., M.Si

NIP.197808182009121002

Advisor II



Dra. Tuty Khairunnisvah. M.A

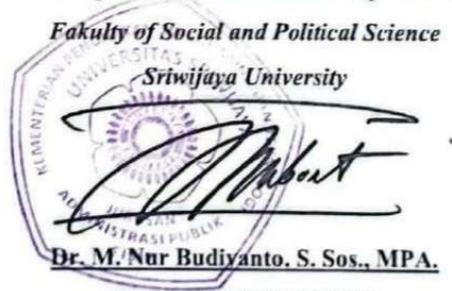
NIP.196201051988032004

Indralaya, 26 Mei 2025

Head of Public Administration Department

Fakulty of Social and Political Science

Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto. S. Sos., MPA.

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jugalah masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Palembang Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir)”. Sholawat dan salam tak lupa penulis turunkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang senantiasa menjadi teladan bagi umat manusia. selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ibu dan Bapak serta kakak dan adik saya yang selalu memberi dukungan serta tidak letih mendoakan penulis. Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan usulan penelitian ini, Penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya

2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. Bapak Dr. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik periode 2018-2022 serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan support yang terbaik
5. Ibu Ermanovida, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik periode 2018-2022
6. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik
7. Bapak Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan waktu dan selalu sabar dalam membimbing serta memberikan solusi yang terbaik
8. Ibu Dra. Tuty Khairunnisyah, MA selaku Pembimbing kedua yang telah memberikan waktu dan selalu sabar dalam membimbing, serta memberikan ilmu yang sangat berguna
9. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku dosen penguji pertama seminar proposal skripsi
10. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum selaku dosen penguji kedua seminar proposal skripsi
11. Staf Administrasi jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah membantu dan mempersiapkan semua kebutuhan untuk pelaksanaan seminar proposal skripsi

12. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
13. Bapak Irham Fuadi, S.E selaku Kepala Desa Palembang
14. Bapak Dian Suryana selaku Sekretaris Desa Palembang
15. Seluruh perangkat Desa Palembang dan anggota BPD Desa Palembang
16. Sahabat dan teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat, dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Apabila ada kekeliruan dalam penulisan kata Penulis mohon maaf dan menerima saran dan kritik yang membangun. Atas segala perhatian dan kerja samanya Penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 2025

Adinda Margareta

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|------|
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 14 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 14 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 14 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis..... | 14 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 16 |
| 2.1.1 Otonomi Daerah dan Desa..... | 16 |
| 2.1.2 Partisipasi Perempuan..... | 18 |
| 2.1.3 Gender Budgeting..... | 30 |
| 2.1.4 Pengelolaan Dana Desa..... | 32 |
| 2.2 Teori yang Digunakan..... | 37 |
| 2.3 Penelitian Terdahulu..... | 39 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran..... | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 46 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 46 |
| 3.2 Definisi Konsep..... | 46 |
| 3.3 Fokus Penelitian..... | 47 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data..... | 50 |
| 3.5 Informan Penelitian..... | 51 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 51 |
| 3.7 Teknik Analisis Data..... | 52 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.8 Sistematika Penulisan | 54 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 56 |
| 4.1 Gambaran Umum | 56 |
| 4.1.1 Sejarah Pembangunan dan Tata Pemerintahan Desa Palembang | 56 |
| 4.1.2 Demografi Desa Palembang | 57 |
| 4.1.3 Kondisi Pemerintahan Desa Palembang | 59 |
| 4.2 Hasil Penelitian..... | 64 |
| 4.2.1 Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Tahap Perencanaan..... | 64 |
| 4.2.2 Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Tahap Penganggaran | 69 |
| 4.2.3 Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Tahap Pelaksanaan | 74 |
| 4.2.4 Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa | 76 |
| 4.3 Pembahasan..... | 79 |
| BAB V PENUTUP..... | 83 |
| 5.1 Kesimpulan | 83 |
| 5.2 Saran | 85 |
| LAMPIRAN | 88 |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Alokasi Dana Desa kepada Perempuan | 6 |
| Tabel 1. 2 Data peserta Musyawarah Desa..... | 8 |
| Tabel 1. 3 Jumlah penduduk Desa Palembang | 9 |
| Tabel 1. 4 BPD menurut Jenis Kelamin dan Desa di Kecamatan Indralaya Utara | 11 |
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu | 40 |
| Tabel 3. 1 Fokus Penelitian | 48 |
| Tabel 3. 2 Daftar Dokumen Penelitian | 50 |
| Tabel 3. 3 Informan Penelitian | 51 |
| Tabel 4. 1 Sumber Penghasilan Utama RT Dirinci Menurut Sektor Usaha Desa Palembang | 59 |
| Tabel 4. 2 Daftar Anggota Posyandu | 63 |
| Tabel 4. 3 Daftar Anggota Karang Taruna | 64 |
| Tabel 4.4 Rincian Dana Desa dalam APBDes Desa Palembang | 72 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Tingkat Kehadiran Masyarakat dalam Musyawarah Desa..... | 7 |
| Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa | 35 |
| Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran..... | 45 |
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa | 60 |
| Gambar 4. 2 Dokumentasi Musyawarah Desa Palembang Tahun 2022..... | 67 |
| Gambar 4. 3 Alur Penganggaran..... | 70 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|----------------------------------------|
| ADD | : Alokasi Dana Desa |
| APBDes | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa |
| BLT | : Bantuan Langsung Tunai |
| BPD | : Badan Permusyawaratan Desa |
| BUMDes | : Badan Usaha Milik Desa |
| DDS | : Dana Desa |
| GBHN | : Garis Besar Haluan Negara |
| MDGs | : <i>Millenium Development Goals</i> |
| Musdes | : Musyawarah Desa |
| PAD | : Pendapatan Asli Desa |
| PBH | : Pendapatan Bagi Hasil |
| PHK | : Pemutusan Hubungan Kerja |
| PKK | : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga |
| PLD | : Pendamping Lokal Desa |
| PMT | : Pemberian Makanan Tambahan |
| RKP | : Rencana Kerja Pembangunan |
| RPJM | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah |
| RT | : Rukun Tetangga |
| SDGs | : <i>Sustainable Development Goals</i> |
| SILPA | : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Izin Penelitian

Lampiran 4. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi

Lampiran 5. Kartu Perbaikan Seminar Proposal

Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 7. Kartu Perbaikan Skripsi

Lampiran 8. Pedoman Wawancara

Lampiran 9. Pedoman Observasi

Lampiran 10. Hasil Coding Atlas.Ti 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu program pembangunan yang bersifat universal yang diselenggarakan oleh negara berkembang dan negara maju. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan. Menyadari bahwa sebelum adanya *SDGs* ini telah dilaksanakan program *MDGs* atau *Millennium Development Goals*, namun pelaksanaannya tidak bersifat keseluruhan yakni hanya negara-negara yang berkembang yang ikut.

Sustainable Development Goals dibentuk untuk mewujudkan keadilan untuk manusia yang mana didalamnya negara maju dan negara berkembang ikut menjadi objek pembangunan. *Sustainable Development Goals* mengutamakan prinsip bahwa tidak ada satupun negara yang tertinggal. Dalam pelaksanaannya *SDGs* memiliki 17 tujuan yang terdapat dalam 169 target dan 241 indikator yang saling berhubungan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan *SDGs*. Dengan adanya peraturan tersebut, otomatis seluruh daerah wajib untuk menjalankan peraturan itu supaya tidak ada lagi kesenjangan yang ada di setiap provinsi, perkotaan, serta pedesaan. Untuk daerah pedesaan, dibentuk *SDGs* desa sebagai upaya untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap desa memiliki kewenangan masing-masing dalam melaksanakan pemerintahannya. Hal tersebut tercantum dalam UU Desa No.06 Tahun 2014 tentang desa mendorong kewenangan pemerintahan desa lebih luas dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan pada tingkatan desa. Pembangunan desa dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat desa serta agar dapat membantu menanggulangi kemiskinan dengan mengembangkan potensi sumber daya alam dan membangun sarana prasarana desa secara berkelanjutan. Untuk mendorong pembangunan desa tersebut pemerintah mencanangkan setiap desa diberikan bantuan dana desa sebesar Rp. 750 juta per desa. Adapun dana tersebut diberikan secara bertahap mulai dari bulan april tahun 2016 dengan ketentuan desa tersebut telah memenuhi persyaratan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Di dalam proses pembangunan, terdapat beberapa unsur yang terlibat didalamnya yakni pihak pemerintah daerah, kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok-kelompok warga tingkat desa. Dengan demikian, perempuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang menjadi penting keberadaannya. Hal ini berkaitan dengan amanah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa dijamin dengan hadirnya Undang-Undang Desa yang mengharuskan desa berasaskan partisipasi dan kesetaraan. Hal ini juga terkait pada terselenggaranya pemerintahan desa yang berkeadilan gender dan diatur pula posisi anggota Badan Permusyawaratan Desa

atau BPD yang harus mempertimbangkan aspek gender di dalamnya. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melibatkan perempuan dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Adapun partisipasi dalam tahap perencanaan yakni dalam bentuk kehadiran dalam setiap musyawarah yang dilakukan di desa tersebut, juga dalam bentuk masukan-masukan yang diberikan masyarakat dalam merencanakan pembangunan. Kemudian partisipasi dalam tahap pelaksanaan yakni dalam bentuk sumbangan bantuan tenaga, peralatan, serta makanan dan minuman. Selanjutnya partisipasi dalam tahap evaluasi yakni dalam bentuk pemberian saran maupun kritikan dari masyarakat yang dapat membangun dan meningkatkan pengelolaan dana desa.

Partisipasi perempuan dapat berkaitan dengan ilmu administrasi publik. Partisipasi perempuan dalam pendekatan administrasi publik telah meluas dan berkembang. Terdapat beberapa asumsi terkait partisipasi perempuan dalam administrasi publik, ada yang menghubungkan partisipasi dengan tata kelola pemerintahan, partisipasi dengan kebijakan publik, dan ada juga yang menghubungkan partisipasi dengan pembangunan. Walaupun penggunaan konsep partisipasi yang berbeda, tetapi maknanya tetap sama, yakni membahas betapa pentingnya partisipasi masyarakat baik itu dalam tata kelola pemerintahan maupun pembangunan sehingga dapat menjadikan administrasi publik dapat mendorong ke arah yang lebih baik mengingat fokus dari administrasi publik yakni citizen atau masyarakat.

Desa Palemraya merupakan salah satu desa dari 227 desa di Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan data laporan kependudukan tahun 2022 jumlah penduduk desa ada sebanyak 4.104 jiwa. Dengan observasi awal yang dilakukan di desa tersebut

dengan jumlah perempuan sebanyak 2.043 orang mengenai keterlibatan perempuan terdapat beberapa permasalahan yaitu masih adanya faktor yang menjadi penghambat perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Faktor yang menjadi penghambat perempuan untuk berpartisipasi salah satunya yakni adanya kesibukan dan tanggung jawab dalam hal pekerjaan di rumah atau keluarga masing-masing. Dari hasil wawancara dengan empat orang masyarakat desa Palembang diperoleh jawaban tiga orang yang hampir sama yaitu tanggung jawab perempuan sebagai ibu rumah tangga seringkali membuat mereka tidak berpartisipasi ataupun tidak menghadiri rapat-rapat seperti musyawarah desa dan lain-lain. Salah satu jawaban wawancara, disajikan pada kutipan berikut:

“Biasanya faktor yang menghambat untuk terlibat dalam musyawarah desa itu kesibukan dalam pekerjaan di rumah tangga yang kadang banyak hal yang harus dikerjakan, faktor lain yakni seringkali rapat musdes bertepatan dengan kegiatan lain yang mengharuskan untuk memilih tidak mengikuti rapat musdes”

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa perempuan dengan kodratnya mempunyai pekerjaan yang mengharuskan perempuan mengedepankan kepentingan anak-anak dan keluarganya.

Faktor lainnya yakni pola pikir masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya pengelolaan dana desa seperti halnya masyarakat masih berpikir “masa bodoh” terhadap pembangunan desa karena mereka menganggap itu merupakan tanggung jawab pemerintah, padahal sebenarnya masyarakat mempunyai peranan penting dalam pembangunan desa.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat desa Palembang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa orang yang belum menyadari bahwa pembangunan

desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini juga dilatarbelakangi faktor pendidikan dan pengalaman dari masyarakat.

Adapun masalah lain yakni masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dana yang dikelola dan sistem pengelolaan dana desa, hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa terkait masalah pembangunan desa. Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Namun menurut penuturan sekretaris desa realisasi anggaran dana desa setiap tahunnya dipajang di depan kantor desa hanya saja sedikit atau sebagian masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Masyarakat enggan atau malas membaca realisasi anggaran yang telah dipajang di depan kantor desa. Hal tersebut yang membuat masyarakat belum sepenuhnya mengetahui pengelolaan dana desa. Dalam hal ini perempuan yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yakni anggota BPD bidang perempuan dan anak, bendahara desa, ketua PKK, anggota PKK, dan masyarakat desa Palembang.

Dana desa pada tahun 2022 ini dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai sebesar 40 persen. Alokasi Bantuan Langsung Tunai atau BLT ini merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di desa serta sebagai upaya mengantisipasi dampak ekonomi akibat dari pandemi Covid-19. Diketahui sebagian besar masyarakat ikut terdampak pandemi Covid-19 seperti terkena PHK, usaha yang tidak berjalan lancar sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, dana desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai sebesar 40 persen. Setelah dana desa dialokasikan ke BLT sebesar 40 persen, barulah sisanya dialokasikan untuk kepentingan lainnya. Salah

satunya yakni dialokasikan kepada perempuan, adapun rincian anggarannya ditunjukkan Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Alokasi Dana Desa kepada Perempuan

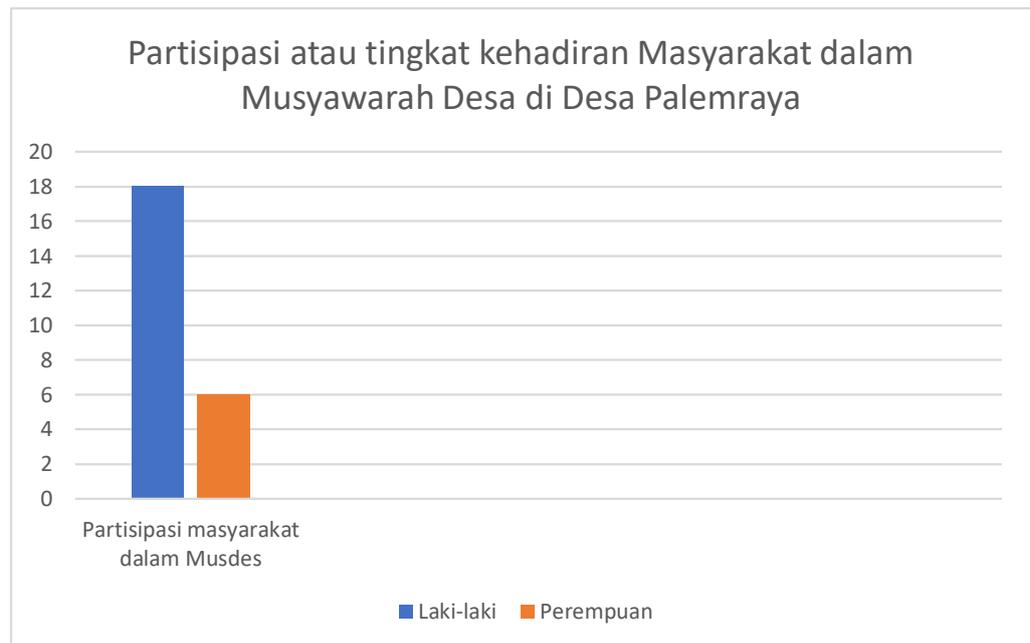
| No. | Uraian | Anggaran | Sumber dana |
|-----|-------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1. | Pendidikan | 81.000.000 | PAD, ADD, DDS, SILPA ADD |
| 2. | Kesehatan | 46.400.000 | PAD, ADD, DDS, SILPA ADD |
| 3. | Kelembagaan masyarakat seperti: PKK | 17.400.000 | ADD, PBH |

Sumber: Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palembang Tahun 2021

Masyarakat diikutsertakan dalam pengelolaan dana desa. Adapun bentuk keikutsertaan masyarakat yakni pada perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Di dalam perencanaan, masyarakat ikut serta dalam musyawarah desa yakni membahas rencana ke depan yang akan dilakukan desa dalam mengelola dana desa. Dalam pelaksanaan, masyarakat ikut serta dalam gotong royong membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Lalu, dalam hal pengawasan, masyarakat ikut serta dalam hal memberikan saran dan kritik terhadap dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

Dalam menampung aspirasi dari masyarakat desa, biasanya didapat saat musyawarah desa (musdes). Adapun musyawarah desa ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat desa yang mewakili semua kalangan. Dari hasil observasi awal pra penelitian, didapat data terkait daftar hadir pada dokumen notulensi musyawarah Desa Palembang Tahun 2022. Adapun data tersebut seperti berikut:

Gambar 1. 1 Tingkat Kehadiran Masyarakat dalam Musyawarah Desa



Sumber: Data Absensi Musyawarah Desa Palembang diolah oleh penulis

Dari gambar di atas dapat dinyatakan bahwa Partisipasi langsung perempuan di dalam Musyawarah Desa di Desa Palembang kurang dari 30%. Adapun peserta musyawarah desa pada tahun 2022 ditunjukkan Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Data peserta Musyawarah Desa

| No. | Elemen peserta | L | % | P | % | Jumlah | % |
|-----|-------------------|----|-----|---|-----|--------|------|
| 1. | Kepala desa | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 |
| 2. | Perangkat desa | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12,5 |
| 3. | Kepala dusun | 3 | 13 | - | - | 3 | 12,5 |
| 4. | RT | 7 | 29 | - | - | 7 | 30 |
| 5. | Pendamping desa | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 6. | PLD | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 7. | BPD | 3 | 13 | - | - | 3 | 13 |
| 8. | Tokoh masyarakat | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 9. | Organisasi sosial | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 |
| 10. | PKK | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 11. | Bumdes | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 |
| | Jumlah | 18 | 75% | 6 | 25% | 24 | 100% |

Sumber: Daftar Kehadiran Musyawarah Desa Palembang

Demikian juga tingkat partisipasi perempuan dalam hal keterlibatan di dalam rapat musyawarah desa masih kurang yakni dapat terlihat adanya ketimpangan dalam hal tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki. Musyawarah desa yang baru-baru ini dilakukan yakni pada tanggal 24 Februari 2022 di Desa Palembang

memberikan hasil bahwasanya tingkat kehadiran atau partisipasi perempuan hanya sejumlah 6 orang yakni ketua PKK, Bendahara Desa, Sekretaris PKK, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa serta satu orang masyarakat. Hal tersebut tentunya dapat dikatakan partisipasi perempuan masih kurang sehingga peningkatan dalam pengelolaan dana desa masih belum berjalan dengan baik dalam hal partisipasinya.

Tabel 1. 3 Jumlah penduduk Desa Palembang

| No. | Kelompok umur | Dusun I | | Dusun II | | Dusun III | |
|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki |
| 1. | 0-9 | 86 | 74 | 163 | 186 | 53 | 54 |
| 2. | 10-19 | 118 | 88 | 184 | 191 | 64 | 67 |
| 3. | 20-29 | 95 | 98 | 180 | 226 | 67 | 61 |
| 4. | 30-39 | 94 | 87 | 187 | 174 | 61 | 65 |
| 5. | 40-49 | 73 | 69 | 152 | 155 | 53 | 62 |
| 6. | 50-59 | 62 | 58 | 129 | 96 | 51 | 59 |
| 7. | 60-69 | 24 | 34 | 53 | 87 | 44 | 39 |
| 8. | 70+ | 10 | 7 | 10 | 6 | 30 | 18 |
| Jumlah | | 562 | 515 | 1058 | 1121 | 423 | 425 |

Sumber: Jumlah Penduduk Perdesun Desa Palembang

Jumlah penduduk perempuan desa yang berjumlah 2043 dari jumlah penduduk keseluruhan laki-laki dan perempuan yakni berjumlah 4104. Dari data tersebut diatas menyebutkan bahwasanya angka yang terbilang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa yakni sejumlah 962 orang dari

usia 20 sampai dengan 49 tahun. Terkait dengan partisipasi perempuan dalam musyawarah desa yang hanya berjumlah 6 orang dari 962 orang artinya hanya 0,6% masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang ikut terlibat. Hal ini tentunya membawa pernyataan bahwa partisipasi perempuan dalam musyawarah desa kurang dari 30%.

Dalam hal lain juga diharuskan adanya keterwakilan perempuan yakni di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110/2016 tentang BPD atau badan pengawas desa telah mengamanatkan kewajiban adanya unsur perempuan dalam struktur BPD. Setidaknya satu orang anggota perempuan harus ditempatkan dalam keanggotaan berjumlah minimal lima orang dan maksimal sembilan orang. Hal ini telah sejalan dan telah dilaksanakan di Desa Palembang yang mana anggota BPD-nya telah diisi oleh satu orang perempuan.

Namun, lain hal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap desa dibentuk BPD yang jumlah penduduk desa yang bersangkutan, yakni:

1. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota
2. Jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2000, 7 orang anggota
3. Jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500, 9 orang anggota
4. Jumlah penduduk lebih dari 2501, 11 orang anggota.

Seperti yang telah disebutkan di atas, dengan jumlah penduduk Desa Palembang yang berjumlah 4104 jiwa, maka BPD yang dianjurkan yakni berjumlah 11 orang anggota. Namun, dalam hal ini di Desa Palembang hanya terdapat 7 orang yang menjabat sebagai anggota BPD. Artinya, kedudukan perempuan dalam BPD

masih kurang. Hal ini juga dapat dilihat dalam data BPD se-kabupaten Ogan Ilir berikut.

Tabel 1. 4 BPD menurut Jenis Kelamin dan Desa di Kecamatan Indralaya Utara

| No. | Desa | Anggota BPD | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| | | L | | P | | L+P | |
| | | Jml | % | Jml | % | Jml | % |
| 1. | Tanjung pering | 4 | 80 | 1 | 20 | 5 | 100 |
| 2. | Bakung | 4 | 80 | 1 | 20 | 5 | 100 |
| 3. | Lorok | 3 | 60 | 2 | 40 | 5 | 100 |
| 4. | Parit | 4 | 80 | 1 | 20 | 5 | 100 |
| 5. | Payakabung | 5 | 71,42 | 2 | 28,58 | 7 | 100 |
| 6. | Sungai Rambutan | 3 | 33,33 | 6 | 66,67 | 9 | 100 |
| 7. | Purnajaya | 3 | 60 | 2 | 40 | 5 | 100 |
| 8. | Soak Batok | 7 | 77,78 | 2 | 22,22 | 9 | 100 |
| 9. | Tanjung Baru | 5 | 71,42 | 2 | 28,58 | 7 | 100 |
| 10. | Pulau Kabal | 4 | 80 | 1 | 20 | 5 | 100 |
| 11. | Tanjung Pule | 4 | 80 | 1 | 20 | 5 | 100 |
| 12. | Permata baru | 4 | 80 | 1 | 20 | 5 | 100 |
| 13. | Sukamulya | 2 | 40 | 3 | 60 | 5 | 100 |
| 14. | Pulau Semambu | 5 | 71,42 | 2 | 28,58 | 7 | 100 |
| 15. | Palemraya | 6 | 85,72 | 1 | 14,28 | 7 | 100 |
| Kecamatan Indralaya Utara | | 63 | 69,23 | 28 | 30,77 | 91 | 100 |

Sumber: Profil Gender Kecamatan Indralaya Utara

Keterwakilan perempuan di BPD Kecamatan Indralaya Utara masih didominasi oleh laki-laki, sementara keterwakilan perempuan sangat rendah. Berdasarkan table 1. Terdapat ketimpangan yang sangat tinggi antara laki-laki dan perempuan yakni di Desa Palemraya, karena anggota BPD perempuan hanya 14,28% atau berjumlah satu orang dari 7 orang anggota BPD.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hardianti et al., 2017) dengan judul Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Infrastruktur Desa menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tergolong masih rendah hal ini dipengaruhi oleh pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Namun, lain hal dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Roswita & Novriyanti, 2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat rendah dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fanzikri, 2019) yang menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam kelembagaan dan pembangunan desa.

Penelitian selanjutnya yang juga menunjukkan partisipasi masyarakat masih rendah yakni penelitian oleh (Syamsi, 2014) yang meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dijelaskan di atas, penelitian berikut menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat tergolong cukup optimal yakni pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Kilo et al., 2018) yang meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa yang menunjukkan keterlibatan masyarakat langsung dengan didukung oleh informasi laporan keuangan desa yang baik. Kedua, penelitian yang dilakukan (Alen & Hasdin, 2019) yang berjudul partisipasi masyarakat dalam penggunaan alokasi dana desa dalam perspektif civic responsibilities di desa Kotaraya yakni menunjukkan hasil bahwasanya partisipasi masyarakat sudah cukup baik dengan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Yang ketiga yakni penelitian yang dilakukan oleh (Arifai, 2022) yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sudah maksimal dengan adanya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Yang keempat penelitian yang dilakukan oleh (Kumeira, 2018) yang berjudul analisis partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah optimal. Dan yang kelima yakni penelitian yang dilakukan (Fachrun et al., 2020) yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan

Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah optimal dengan dipengaruhi kegiatan gotong royong masyarakat yang masih kental.

Lain hal dari penelitian yang disebutkan di atas, penelitian yang dilakukan oleh (Nurhalimah & Edison, 2018) yang menunjukkan partisipasi perempuan berada pada tingkatan *delegated power*, *placation*, dan *consultation*. Pada penelitian tersebut partisipasi perempuan dilihat dari tingkatan partisipasinya.

Perbedaan yang ditemukan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya hanya membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat dan pentingnya partisipasi tersebut dalam pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di suatu desa. Sedangkan dalam penelitian ini, membahas tentang bagaimana tingkat partisipasi perempuan dilihat dari tangga partisipasinya. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang fokus ke peran perempuan desa. Padahal, peran perempuan desa menjadi penting dalam pengelolaan dana desa karena perempuan merupakan investasi, aset, dan potensi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Adapun partisipasi yang dimaksud tidak hanya partisipasi Sebagian saja atau hanya didominasi oleh laki-laki, namun juga memperhatikan pentingnya partisipasi perempuan dalam hal pengelolaan dana desa. Mengingat pertama, bahwa jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dari penduduk laki-laki maka partisipasi perempuan sangat diharapkan kehadirannya untuk ikut aktif dalam pengelolaan dana desa. Kedua, dilihat dari rendahnya masyarakat perempuan dalam menghadiri musyawarah desa yang dapat menjadi kurangnya melahirkan program yang terkait

dengan perempuan. Dan ketiga, dilihat dari persentase partisipasi perempuan dalam BPD, persentase pada Desa Palemraya yang merupakan persentase terkecil. Oleh sebab itu, untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan dana desa di Desa Palemraya sehingga judul berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan adalah “Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Palemraya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Palemraya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Palemraya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berupa pengetahuan tentang Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Palemraya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir agar lebih baik lagi kedepannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan wawasan mengenai Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Palemraya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir kepada pihak-pihak yang belum mengetahui apa saja yang dimaksudkan dengan Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*. Jejak Publisher.
- Raco J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. PT Bumi Aksara.
- Rusdiana, & Zaqiah, Q. Y. (2022). *Manajemen Perkantoran Modern*. Insan Komunika

Internet

- Alen, S., & Hasdin. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perspektif Civic Responibilities di Desa Kotaraya Induk Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.
- Arifai, M. (2022). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, 5(1), 55–70.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Fachrun, M., Muhiddin, A., Hardi, R., & Randhy Akbar, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1. <https://doi.org/10.32669/village>
- Fanzikri, M. (2019). Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Dan Pembangunan Desa Diaceh.
- Hajar, S. (2018). Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Hardianti1, S., Muhammad, H., & Lutfi2, D. M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampara Kota). *Jurnal Katalogis*, 5(1), 120–126. <http://elkanagoro.blogspot.co>.
- Kilo, P., Fahik, B., & Suprojo, A. (2018). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa. *JISIP*, 7(1), 93. www.publikasi.unitri.ac.id
- Kumeira, B. (2018). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Baru Sungai Deras. *Journal of RESIDU*, 2(9). www.rc-institut.id
- Marit, E. L. (2021). Pengantar Otonomi Daerah dan Desa. Yayasan Kita Menulis.
- Nurhalimah, A., & Edison. (2018). Partisipasi Kaum Perempuan dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 1–10.

- Roswita, D., & Novriyanti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 22, 22–33.
- Suaib, H. (2017). *Suku Moi: Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Animage.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 21. www.publikasi.unitri.ac.id

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014. (n.d.).